

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir dan bahkan sebelum lahir (Sadi, 2015:102). Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Undang-undang No.39 Tahun 1999 Pasal 54 dalam buku HAM dalam konstitusi Indonesia dari UU 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945. 2002). ). Pemenuhan hak adalah hal yang wajib dan perlu dilaksanakan pemerintah sebagai penyelenggara Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya ([www.sapa.or.id/perlindungan-sosial-dan-pemenuhan-hak-dasar](http://www.sapa.or.id/perlindungan-sosial-dan-pemenuhan-hak-dasar).diakses16 Januari 2019.)

Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar (Olsen dalam Tarmansyah, 2007:82). Pendidikan inklusif harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Tarmansyah dalam jurnal Tarmansyah. 2003).

Pada tahun 2004 sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia terhadap pendidikan inklusif, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalangkan sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat. Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang sudah di atur dalam Undang-Undang pasal 6 ayat 1. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya,

terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Undang-undang Penyandang Cacat:1997).

Menurut pemerintah ada tiga tujuan pendidikan inklusif di Indonesia, (Kemendiknas, 2007) pertama memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, kedua membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, ketiga membantu meningkatkan program mutu pendidikan dasar menengah dan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah.

Sumatera Barat<sup>1</sup> sendiri adalah Provinsi ke delapan yang mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif di Indonesia. Pendeklarasian itu di sampaikan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Jumat, 3 Oktober 2014 yang di hadiri oleh wakil menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasi, Ketua DPRD Sumatera Barat Hendara Irawan Rahim, kepala Daerah Se-Sumatera Barat, pemimpin DPRD Se-Sumatera Barat serta sejumlah tokoh pendidikan Sumatera Barat. Kabupaten dan Kota yang mendukung Pendidikan Inklusif dan sudah menjalankannya antara lain Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang. Sekolah pertama yang menjalankan pendidikan inklusif di Sumatera Barat adalah SMP N 23 Padang, yang dalam pelaksanaannya di dampingi oleh tenaga ahli pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat (<http://sumbar.antaranews.com>).

Penelitian terdahulu mengenai pendidikan inklusif diantaranya adalah Nurjanah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, jurusan Pendidikan

---

<sup>1</sup>Sejak awal 2000 pemerintah Republik Indonesia mengembangkan program pendidikan inklusif yang merupakan lanjutan dari program pendidikan terpadu pada tahun 1980an. Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Pada tahun 2005 diadakan Simposium internasional di Bukittinggi untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar.

Sosiologi dan Antropologi. Surakarta, 2013 yang meneliti mengenai Sekolah Inklusi Sebagai Perwujudan Pendidikan Tanpa Diskriminasi, tujuan dari penelitian ini adalah pertama mengetahui pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di SMK N 9 Surakarta, kedua mengetahui kepedulian yang di bangun antar siswa dalam sebuah kelas inklusi di SMK N 9 Surakarta. Selanjutnya itu ada Indar Mery Handayani dari Fakultas FISIP jurusan Sosiatri Universitas Mulawarman 2013 dengan judul Interaksi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 016 Inklusif Samarinda (Studi Kasus Anak Penyandang Autis) tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana proses interaksi sosial anak penyandang autis dengan objek penelitian adalah siswa penyandang autis di SDN 016 Samarinda.

Berdasarkan studi yang telah ada hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana upaya sekolah dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam hal pemenuhan hak disekolah inklusif di SMP N 5 Padang Panjang. Banyak sekolah yang memberi kesempatan belajar bagi siswa atau siswi yang berkebutuhan khusus dan hal ini cukup menarik bagi peneliti untuk mengetahui upaya sekolah dalam hal itu, seperti mengetahui kebijakan-kebijakan sekolah untuk ABK, implementasi dari kebijakan-kebijakan dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam pemenuhan kebutuhan ABK.

Padang Panjang sebagai kota yang sangat peduli terhadap pendidikan telah menerapkan pendidikan inkulsif, sehingga anak yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lainnya dalam hal mendapatkan pendidikan. Sekolah yang di tunjuk untuk pendidikan inklusif ini di tingkatan SMP adalah SMP N 5 Padang Panjang, SMP N 4 Padang Panjang. Sedangkan untuk tingkat SMA adalah SMA N 3 Padang Panjang dan SMK N 2 Padang Panjang.

Untuk SMP N 5 Padang Panjang Siswa inklusif tidak di jadikan satu kelas melainkan digabungkan dengan siswa-siswa regular lainnya dalam satu kelas dan tetap melalui proses

belajar mengajar bagaimana sekolah umum lainnya, dengan di dampingi oleh guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus, SMP N 5 Padang Panjang juga tidak memiliki kriteria khusus dalam penerimaan siswa-siswi inklusif yaitu dengan menggunakan surat rekomendasi melalui sekolah terdahulu (sekolah reguler) atau surat rekomendasi dari SDLB yang menyatakan bahwa siswa dapat mengikuti sekolah inklusif di SMP N 5 Padang Panjang dan nantinya juga akan diadakan tes untuk mengetahui klasifikasi kebutuhan dari setiap anak. Untuk penilaiannya anak inklusif diberi beberapa standar yang berbeda dengan anak reguler sebagai contohnya yaitu disetiap ujian ABK tidak diwajibkan menjawab seluruh soal cukup dengan hanya menjawab setengah dari jumlah soal yang sudah ditentukan.

Di SMP Negeri 5 Padang Panjang terdapat 22 siswa siswi inkusi dari 748 jumlah siswa dan siswi yang ada di SMP N Padang Panjang. Dari 22 jumlah siswa inklusif yang terbagi dari kelas 1,2, dan 3 memiliki kebutuhan yang beragam. Berikut data siswa inklusif di SMP N 5 Padang Panjang.

**Tabel 1.1**  
**Data siswa inklusi di SMP N 5 Padang Panjang**

No	Jenis Kelamin	Kelas	Keterangan
1.	L	VII	Autis
2.	L	VII	Autis
3.	L	VII	ADHD
4.	L	VII	Keterlambatan Belajar
5.	L	VII	Keterlambatan Belajar
6.	L	VII	Keterlambatan Belajar
7.	L	VII	Keterlambatan Belajar
8.	L	VII	Keterlambatan Belajar
9.	L	VII	Keterlambatan Belajar
10.	L	VII	Keterlambatan Belajar
11.	L	VII	Keterlambatan Belajar
12.	P	VII	Keterlambatan Belajar
13.	P	VIII	Tuna Rungu
14.	L	VIII	Keterlambatan Belajar
15.	L	VIII	Keterlambatan Belajar
16.	L	VIII	Kontrol emosi tidak stabil
17.	L	VIII	Keterlambatan Belajar
18.	L	VIII	Keterlambatan Belajar
19.	L	VIII	Autis
20.	L	IX	Gangguan Penglihatan
21.	L	IX	Autis

Adaptasi dalam proses belajar mengajar bagi siswa berkebutuhan khusus merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam pendidikan inklusif, karena sekolah merupakan tempat belajar individu, dan tempat berinteraksi dengan individu lainnya. Guru dan siswa pun dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang terdiri dari guru-guru, siswa, dan perangkat sekolah lainnya. Guru yang langsung berinteraksi dengan siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar harus mampu memahami karakter dan kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus tersebut sehingga dapat menentukan bagaimana proses belajar mengajar yang dapat memenuhi kebutuhan dari siswa inklusif tersebut.

Pemenuhan hak dari sekolah terhadap ABK untuk SMP N 5 Padang Panjang dalam menjalankan proses belajar mengajar sangat begitu di perhatikan oleh pihak sekolah. Pemenuhan kebutuhan yang sama dari sekolah terhadap siswa inklusif dan regular dalam proses belajar dan mengajar yang menyatukan antara siswa inklusif dengan siswa regular sangat menarik untuk diteliti agar tidak ada diskriminasi antar siswa inklusif dengan siswa regular yang terjadi di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Sehingga memberikan pandangan bagi masyarakat bahwa siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dapat besekolah di sekolah luar biasa tetapi juga dapat mengikuti sekolah umum seperti anak normal lainnya dan bagi siswa-siswi regular pun ini juga dapat dijadikan proses untuk saling menghargai perbedaan diantara mereka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebhinekaan antar manusia yang

mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik (dalam jurnal, peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif:Handayani&Rahadian Angga Sisca:2013).

Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan haknya. Peserta didik yang memiliki kelainan yang di maksud adalah tunanetra (gangguan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), tunawicara (gangguan bicara), tunagrahita (gangguan mental), tundaksa (kelainan fisik dikarenakan kecelakaan atau bawaan dari lahir), tunalaras (gangguan atau hambatan emosi dan kontrol sosial) , berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1991 menyatakan ada 8 hak anak berkebutuhan khusus: pertama memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan kelainanya, kedua memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, ketiga mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan, keempat memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang di sandang dan persyaratan yang berlaku, kelima pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki, keenam memperoleh penilaian hasil belajar, ketujuh menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang di tentukan, dan kedelapan memperoleh layanan khusus sesuai dengan yang disandang (Hukumonline.com).



Dengan diaturnya hak anak berkebutuhan khusus dalam sekolah inklusif maka peneliti ingin mengkaji: Bagaimana upaya pemenuhan hak ABK di SMP N 5 Padang Panjang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum: Mendeskripsikan upaya pemenuhan kebutuhan ABK dalam sekolah inklusif di SMP Negeri 5 Padang Panjang.

2. Tujuan Khusus:

1. Mendeskripsikan kebijakan SMP N 5 Padang Panjang sebagai sekolah inklusif.
2. Mendeskripsikan implementasi kebijakan SMP N 5 Padang Panjang sebagai sekolah inklusif
3. Mendeskripsikan kendala-kendala sekolah, guru dan ABK dalam sekolah inklusif di SMP N 5 Padang Panjang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis

Untuk menambah pengetahuan mengenai masalah pendidikan serta menjadi masukan disiplin ilmu sosiologi khususnya studi sosiologi pendidikan.

2. Aspek Praktis

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait seperti sekolah dan masyarakat serta bagi peneliti lain untuk mengkaji masalah mengenai hal ini.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Sosiologis**

Pada penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial. Salah satu teori yang termasuk dalam paradigma fakta sosial adalah teori struktural fungsional, yang dikemukakan oleh Talcott Persons.

Teori ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri Dari berbagai bagian atau sub sistem yang saling berhubungan secara fungsional, terintegrasi kedalam suatu bentuk ekuilibrium, Teori ini menekankan adanya keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan, jika terjadi perubahan itu merupakan hasil penyesuaian Dari luar, Tumbuh Dari adanya diferensiasi dan inovasi. Teori struktural fungsional person menyatakan bahwa sistem sosial menurut konsep-konsep kunci dalam karya persons yakni aktor, Interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan dan kultur, Persons dengan demikian mendefenisikan sistem sosial sebagai berikut: Sistem sosoal terdiri atas sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik. Aktor-aktor yang memiliki motivasi, dalam arti memiliki kecendrungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang berhubungan dengan situasi yang didefenisikan dan dimediasi dalam simbol bersama yang terstruktur secara kultural. (Ritzer:2007:124)

Menurut Person agar sistem sosial dapat bekerja dengan baik, setidaknya harus ada 4 fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, yaitu *Adaptation* atau adaptasi (A), *Goal Attainment* atau pencapai tujuan (G), *Integration* atau integrasi (I), dan *Latent Pattern Maintenance* atau pemeliharaan pola-pola laten (L). (Nanang Martono:2012:50).

1. Adaptation (A)

Fungsi merupakan fungsi yang sangat penting. Pada fungsi ini sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang kompleks, dan sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.

2. Goal Attainment (G)

Sistem harus dapat mendefenisikan dan mencapai tujuan utamanya.



### 3. Integration (I)

Sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Selain itu, sistem harus dapat mengatur dan mengelola kegiatan fungsi (AGI).

### 4. Latent Pattern Maintenance (L)

Sistem harus berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural.

Sekolah di pandang sebagai sebuah sistem sosial, Menurut persons sistem sosial memiliki kebutuhan yang harus dicapai. Untuk melihat bagaimana sistem itu mencapai sebuah tujuan yaitu dengan menggunakan AGIL. SMP N 5 Padang Panjang dipandang sebagai sistem sosial yang salah satu tujuannya melaksanakan pendidikan inklusif yang baik untuk tercapainya tujuan tersebut SMP N 5 Padang Panjang ada kebutuhan yang harus dipenuhi agar ABK dapat mengikuti proses pembelajaran yang baik. Disini sekolah memainkan *Adaptation* (A) dengan memainkan peraturan pemerintah untuk sistem pendidikan inklusif di SMP N 5 Padang Panjang. Pimpinan sekolah juga memainkan peran yaitu pencapaian tujuan *Goal Attainment* (I). guru-guru dan OSIS menjalankan *integration* (I) semua pihak sekolah membangun hubungan yang baik dengan melakukan kegiatan yang membuat ABK dapat mengikuti kegiatan yang juga diikuti siswa regular. Nilai-nilai inklusifitas di sosialisasikan oleh kepala sekolah kepada semua pihak guru-guru dan siswa *laten* (L).

#### 1.5.2 Konsep Pendidikan Inklusif

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Republik Indonesia: 2002), dapat di simpulkan bahwa Negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang

bermutu. Anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak lainya (reguler) dalam pendidikan.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, artinya sekolah mengakomodasi kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya secara optimal, dalam pendidikan inklusif sistem pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan anak, bukan sebaliknya anak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem sekolah yang ada (Wardani, 2007:136). Sekolah inklusif ini pun juga mempunyai guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus, namun bukan untuk mengajar melainkan hanya mendampingi ABK dalam proses belajar di saat ABK mengalami kesusahan dalam memahami proses belajar mengajar.

### **1.5.3 Konsep Pendidikan**

Pendidikan adalah sebuah upaya yang banyak dilakukan orang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Sejak rasionalitas manusia semakin berkembang, kebutuhan manusia untuk meraih pendidikan juga semakin meningkat (Martono, 2010:122).

Pendapat lain yang di kemukakan (Gunawan, 2000:106) pendidikan adalah kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, didalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia, pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Tiada kehidupan masyarakat tanpa adanya kegiatan pendidikan.

### **1.5.4 Konsep Anak Berkebutuhan Khusus**

Menurut Mulyono anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan dan juga anak lantib dan berbakat (2006:26). Menurut (Mangunsong, 2009) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal ciri-ciri mental, fisik, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial, emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran

dari dua atau lebih hal-hal diatas dari rata-rata anak normal ia memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan lainnya.

Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud seperti tunanetra (gangguan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), tunawicara (gangguan bicara), tunagrahita (gangguan mental), tunadaksa (kelainan fisik, dikarenakan kecelakaan ataubawaan dari lahir), tunalaras (gangguan atau hambatan emosi dan kontrol sosial), (HIV AIDS, Narkoba), autisme (kelainan dalam perkembangan saraf), tunaganda (memiliki dua kelainan sekaligus), kesulitan belajar/lambat belajar, ADHD/*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*(gangguan perkembangan dalam aktivitas motorik yang cenderung berlebihan), ADD/*attention deficit disorder* (gangguan aktivitas motorik namun tidak berlebihan dan cenderung pendiam) Hyperaktif, Dysgraphia (kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis dan grafik), Dyslexia (gangguan dalam baca dan tulis), Dysphasia (gangguan perkembangan otak kesulitan dalam berbicara), Dyscalculia (gangguan belajar matematika), Dyspraxia (gangguan motorik), Gifted (penggunaan alat bantu) , potensi kecerdasan istimewa.

### **1.5.5 Penelitian Relevan**

Penelitian yang dirasa relevan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Andalas Nila Aztri (2015) Adaptasi Proses Belajar Mengajar Siswa Inklusi di SMP N 2 Bukitinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan adaptasi guru dalam proses belajar mengajar di SMP N 2 Bukitinggi, kedua adalah mendeskripsikan adaptasi siswa inklusi dalam proses belajar mengajar di SMP N 2 Bukitinggi. Ketiga adalah mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan proses belajar mengajar siswa inklusi di SMP N 2 Bukitinggi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan cara observasi dan wawancara. Dengan hasil penelitian pertama adalah adaptasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswa inklusif dalam proses belajar mengajar tetap menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa reguler, namun diberi kemudahan

oleh pihak sekolah yaitu KKM lebih rendah dan soal ujian setengah dari jumlah soal siswa reguler, untuk siswa tunagrahita. Kedua siswa inklusif dalam proses belajar mengajar hanya dilakukan dengan cara mendengarkan dan memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Ketiga faktor penghambat guru adalah kurangnya pelatihan, penggabungan dengan jumlah siswa dalam satu kelas dan penghargaan terhadap guru yang mengajar siswa inklusif. Serta faktor penghambat untuk siswa inklusif adalah adanya sikap kurang baik dari siswa reguler terhadap anak inklusif dan kurangnya sarana prasarana untuk anak inklusif.

Penelitian yang dirasa relevan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan PPKn Fakultas FKIP Universitas Negeri Sebelas Maret Desty Ratna Permatasari (2016) Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemenuhan hak-hak ABK, dengan tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Dengan hasil penelitian adalah menunjukkan bahawa SDIT Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto telah mampu menerapkan konsep sekolah inklusi dengan cukup baik. Meski masih belum semua hak ABK terpenuhi, namun secara umum hak-hak ABK telah dapat terpenuhi.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian di atas bertujuan untuk menjelaskan adaptasi proses belajar mengajar siswa inklusi dan menggambarkan pemenuhan hak-hak ABK, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan, mendeskripsikan implementasi kebijakan dan mendeskripsikan kendala-kendala sekolah, guru dan ABK dalam sekolah inklusif di SMP N 5 Padang panjang.

2. Teori yang digunakan

Penelitian diatas menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Person dan pendekatan dalam pendidikan, sedangkan penelitian ini menggunakan teroi Fungsionalisme Struktural oleh Robert K Merton.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penelti menggunakan pendekan kualitatif dengan tipe deskripsitif, dengan menggunakan *purposive sampling*. Dan dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengupayakan suatu peneltian dengan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa atau sifat-sifat tertentu. (Afrizal, 2014:13) yang mendefenisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan, maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah di peroleh dan dengan demikian tidak menganalisa angka-angka.

Pendekatan mengacu pada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian dan metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas masalah-masalah penelitiannya (Afrizal, 2014:11). Untuk tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yakni penelitian yang bermaksud memberi gambaran mendalam, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara yang bersifat deskriptif

ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci upaya pemenuhan kebutuhan ABK di SMP N 5 Padang Panjang.

### 1.6.2 Infoman Penelitian

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau sekelompok orang yang diwawancari sebagai sumber informasi.

Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan menentukan secara sengaja informan terlebih dahulu. Mekanisme disengaja atau *purposive sampling* adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:140) pada penelitian ini yang menjadi informan dalam penelitian adalah pihak sekolah, guru-guru, siswa reguler dan ABK yang ada di SMP N 5 Padang Panjang. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (konteks sosial) serta menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang dibangun.

Makaselayaknya mereka disebut informan bukan responden (Afrizal, 2014:139), menurut Afrizal ada dua jenis infoman:

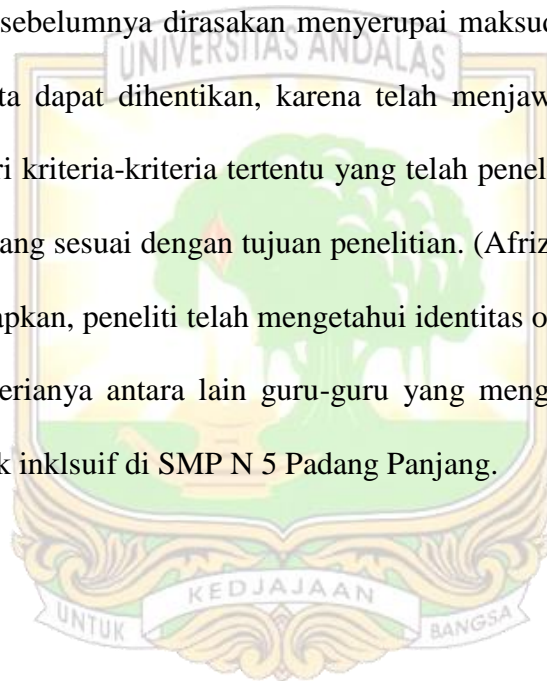
1. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang



kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Informan ini disebut pula informan kunci.

2. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan dirinya tentang perbuatannya, tentang pemikirannya, tentang interprestasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya.

Berdasarkan kriteria, peneliti mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:140). Jumlah informan yang akan diambil dalam penelitian ini berdasarkan atas kejenuhan data, ini berarti informasi dari informan-informan sebelumnya dirasakan menyerupai maksud dari permasalahan maka proses pengumpulan data dapat dihentikan, karena telah menjawab pertanyaan penelitian. Adapun dari maksud dari kriteria-kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan berguna untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Afrizal, 2014:140) berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang dijadikan informan penelitian kriterianya antara lain guru-guru yang mengajar atau yang memasuki kelas yang memiliki anak inklsuif di SMP N 5 Padang Panjang.



**Tabel 1.2**  
**Informan Penelitian**

No	Data	informan	
		pengamat	pelaku
1.	Kebijakan SMP N 5 Padang Panjang		1.Kepala sekolah 2.Guru pendamping ABK 3.Guru-guru 4.Guru BK 5.OSIS 6.ABK
2.	Implementasi kebijakan SMP N 5 Padang Panjang 1. Pembelajaran Individual	1.Kepala Sekolah 2.OSIS 3.Guru BK	1.Guru Pendamping ABK 2.Guru-guru 3.ABK
	2. Literasi	1.Kepala Sekolah 2.OSIS 3.Guru BK	1.Guru Pendamping ABK 2.Guru-guru 3.ABK
	3. Anti Bullying		1.Kepala sekolah 2.Guru pendamping ABK 3.Guru-guru 4.Guru BK 5.OSIS 6.ABK
3.	Kendala SMP N 5 Padang Panjang 1. Kendala Guru di SMP N 5 Padang Panjang		1.Kepala Sekolah 2.Guru Pendamping ABK 3.Guru-guru
	2. Kendala OSIS Dalam Implementasi anti <i>Bullying</i>	1.Kepala Sekolah	1.OSIS 2.Guru BK 3. Guru Pendamping ABK
	3. Kendala ABK	1.Kepala sekolah 2.Guru pendamping ABK 3.Guru-guru 4.Guru BK 5.OSIS	1.ABK

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan secara berulang-ulang (Taylor 1984 dalam Afrizal, 2005:44).

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara, untuk melakukan wawancara berikutnya. Pertanyaan yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara (disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban).

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru-guru, guru pendamping ABK, OSIS dan siswa ABK di SMP N 5 Padang Panjang dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini.

## 2. Pengumpulan Dokumen

Dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen dari hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, dan lain-lain (Afrizal, 2014:21).

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini yang didapatkan langsung dilokasi penelitian, seperti lembaran-lembaran dokumen dari bukti-bukti kebijakan yang ada di SMP N 5 Padang Panjang.

**Tabel 1.3**  
**Teknik Pengumpulan Data**

No	Tujuan Penelitian	Data yang di kumpulkan	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1	Mendeskripsikan kebijakan SMP N 5 Padang Panjang sebagai sekolah inklusif	Dokumen kebijakan SMP N 5 Padang Panjang mengenai pendidikan inklusif.	Data primer: informan Data sekunder: Lembaran tertulis dari sekolah, dokumen-dokumen sekolah	1.Wawancara mendalam 2.Pengumpulan dokumen
2	Mendeskripsikan implementasi kebijakan SMP N 5 Padang Panjang sebagai sekolah inklusif	Mengumpulkan bukti-bukti dari implementasi kebijakan di SMP N 5 Padang Panjang.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi, data tertulis	1.Wawancara mendalam 2. Dokumen
3	Mendeskripsikan kendala-kendala sekolah, guru-guru dan ABK dalam sekolah inklusif di SMP N 5 Padang Panjang	Kendala dalam implementasi kebijakan dan kendala yang ditemukan dari pihak sekolah, guru-guru, & ABK di SMP N 5 Padang Panjang	Data primer: Informan Data sekunder: Data tertulis	1.Wawancara mendalam 2.Dokumen

#### 1.6.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Pada penelitian ini unit analisis peneliti adalah kelompok. Kelompok yang dimaksud disini adalah semua pihak yang ada dalam lingkungan SMP N 5 Padang Panjang seperti kelompok guru, siswa reguler, dan siswa ABK.

### 1.6.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data atau merupakan suatu proses penyusunan data supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan data yaitu sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan (Afrizal, 2014:174).

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam penelitian kualitatif dengan demikian, adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok (Afrizal, 2014: 175-176). Analisis data selama melakukan penelitian tersebut merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, karena aktivitas ini sangat menolong peneliti untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas disebabkan peneliti telah mulai memikirkan data dan menyusun strategi guna mengumpulkan data selanjutnya pada masa proses pengumpulan data. (Afrizal, 2014:177).

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisis data dengan cara kodifikasi data, pengelompokan data dan menyajikan data yang di bimbing langsung oleh bapak dan ibu pembimbing setelah melakukan penelitian dengan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen, yang dilakukan tiga kali pulang-pergi ke lokasi penelitian yang kemudian disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif. Semua data yang telah didapatkan untuk

mendeskripsikan upaya pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam sekolah inklusif di SMP N 5 Padang Panjang.

#### **1.6.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi peneliti dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di SMP N 5 Padang Panjang, kota Padang panjang. Alasan kenapa penelitian dilakukan di SMP N 5 Padang Panjang adalah karena SMP N 5 Padang Panjang sekolah inklusif yang memiliki jumlah anak inklusif terbanyak dan memiliki anak berkebutuhan khusus dengan klasifikasi kebutuhan yang beragam dibandingkan dengan sekolah Inklusif lainnya yang ada di Padang Panjang seperti SMP N 4 Padang Panjang, SMK N 2 Padang Panjang, dan SMK N 2 Padang Panjang. beragam di Padang Panjang.

#### **1.6.7 Operasional Konsep**

1. Pendidikan Inklusif, pemberian akses pendidikan yang lebih baik terhadap semua peserta didik seperti anak yang berkelainan, anak berkebutuhan khusus, anak yang kurang beruntung, anak yang termajinalisasi, anak jalanan dan pekerja, anak dari etnis minoritas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler. (Smith, 2012:45).
2. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi dan fisik. Heward (2003).



